

BAB II

IRAN SEBAGAI NEGARA BERDAULAT

Bab ini akan menjelaskan Kedaulatan Iran sebagai sebuah negara yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama akan menjelaskan Sejarah Negara Iran. Dalam sub bab kedua akan menjelaskan Republik Islam Iran yang terdiri Sejarah Republik Islam Iran, *Vilayat I-Faqih*, dan Politik Luar Negeri Republik Islam Iran. Sub bab ketiga akan menjelaskan Iran masa kini yang terdiri dari Ahmadinejad sebagai Presiden Iran dan Kebijakan Luar negeri Ahmadinejad.

A. Sejarah Negara Iran

Gambar 2.1 Peta Negara Iran



Sumber: <http://musadiqmarhaban.wordpress.com/2008/07/21/tuntutan-ketiga-kali-dari-khurasan/>

Iran berbatasan dengan Azerbaijan dan Armenia di barat laut dan Laut Kaspia di utara, Turkmenistan di Timur Laut, Pakistan dan Afghanistan di Timur, Turki dan Irak di Barat dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan.

Iran berada pada titik pertemuan yang strategis di kawasan Timur Tengah, oleh karena itu Iran sering mengalami berbagai invasi dan dijajah oleh bangsa asing¹⁸. Bangsa Iran juga bangga dengan keberadaannya sebagai bangsa berperadaban tinggi selama ribuan tahun, jauh sebelum invasi Islam-Arab terjadi.

Iran merupakan salah satu negara tertua di dunia. Sejarahnya dimulai dari lebih dari 5000 tahun yang lalu. Dahulu Iran terkenal dengan sebutan Persia. Sejarah Iran dimulai pada Peradaban Proto-Elam 3200-2700SM, Peradaban Jiroft, Dinasti Elam, Kerajaan Mannai, kemudian beralih ke Kekaisaran Media (728–550 SM), Kekaisaran Akhmeniyah (648–330 SM), Kekaisaran Seleukus (330–150 SM), Kekaisaran Parthia (250 SM– 226 M) dan Kekaisaran Sassania (226–650SM).

Berakhirnya Kekaisaran Sassania di Persia ditandai dengan adanya Penaklukan Islam (637–651M) yang masuk ke kawasan ini yang menjadi peradaban dan era baru melalui Kekhalifahan Umayyah (661–750M), Kekhalifahan Abbasiyah (750–1258M). Kekhalifahan Abbasiyah kemudian berakhir dan berganti ke Dinasti Tahiriyah (821-873M) hingga dinasti-dinasti penerusnya sampai terakhir Dinasti Qajar. Namun Dinasti Qajar kemudian digulingkan oleh Shah Reza dan mengganti Persia menjadi Dinasti Pahlevi.

Persia mulai berganti menjadi Islam (Syiah) pada zaman Dinasti Safawi, pada tahun 1501. Dinasti Safawi kemudian menjadi salah satu penguasa dunia yang utama. Jatuhnya Dinasti Safawi ditandai dengan Persia menjadi sebuah

¹⁸ Zahar, "Iranian Revolution; Past, Present and Future", London, 2000, hal 6. Lihat di <http://www.marxist.com/indonesia.revolution/Iran5.htm> diakses pada 20 Desember 2010

medan persaingan antara kekuasaan Kekaisaran Rusia dan Kerajaan Inggris (yang menggunakan Dinasti Qajar).

Modernisasi Iran yang bermula pada abad ke-19 membangkitkan keinginan untuk berubah dari orang-orang Persia. Hal ini menyebabkan terjadinya Revolusi Konstitusi Persia pada tahun 1905-1911. Tahun 1921 Reza Khan atau Shah Reza mengambil alih tahta melalui perebutan kekuasaan Dinasti Qajar yang semakin melemah. Kemudian dimulailah dinasti baru, yaitu Dinasti Pahlevi yang dipimpin oleh Shah Reza.

Kepemimpinan Iran oleh Shah Reza terfokus pada modernisasi skala besar seperti di bidang pendidikan, militer, industri dan pertanian. Namun kekuasaan Shah Reza hanya berlangsung selama 16 tahun. Pecahnya Perang Dunia II menyebabkan program pembangunan Shah Reza berhenti total. Perang Dunia II memaksa Shah Reza mundur karena didesak oleh sekutunya. Kepemimpinan Iran kemudian digantikan oleh anak Shah Reza sendiri, Mohammad Reza Pahlevi.

Pahlevi memerintah secara otokratis seperti ayahnya. Pahlevi melanjutkan modernisasi Iran dan pada saat yang sama juga menggulingkan partai-partai oposisi melalui badan intelejennya, SAVAK (*Sazman-I Ittila'at Amniyat Keshvar*) atau disebut juga Organisasi Informasi dan Keamanan Nasional. Runtuhnya Dinasti Pahlevi mengawali babak baru Negara Iran melalui Revolusi

Iran yang dicetuskan oleh Ayatullah Ruhullah Khomeini¹⁹. Pasca Revolusi Iran, Negara ini berganti menjadi Republik Islam Iran Hingga sekarang.

Iran terdiri dari berbagai suku dan agama. Etnis mayoritas ialah etnis Persia dengan persentase 51% dari seluruh rakyat Iran. Sebanyak 70% rakyatnya adalah bangsa Iran berketurunan orang Arya. Mayoritas masyarakat Iran bertutur dalam bahasa yang tergolong dalam keluarga Bahasa Iran, termasuk bahasa Persia. Kumpulan minoritas rakyat Iran lainnya yaitu Etnis Azeri sebesar 24%, Etnis Gilaki dan Mazandarani sebesar 8%, Kurdi sebesar 7%, Arab sebesar 3%, Baluchi sebesar 2%, Lur sebesar 2%), Turkmen sebesar 2% dan 1% adalah suku-suku kecil lainnya.

Mayoritas penduduk Iran sebesar 98% nya beragama Islam, sebanyak 90% dari muslimnya adalah golongan Syiah dan sebanyak 8% Sunnah Wal Jamaah²⁰. Sisanya 2% penduduk Iran adalah penganut agama Baha'i, Manda, Hindu, Zoroastrianisme, Yahudi dan Kristen. Agama Zoroastrianisme, Yahudi dan Kristen diakui oleh Pemerintah Iran dan turut mempunyai perwakilan di parlemen Negara Iran²¹.

¹⁹ Diyah Rahma Fauziana-Izzudin Irsam Mujib, *Khomeini dan Revolusi Iran*, Narasi, Yogyakarta, 2010

²⁰ D.Danny H. Simanjuntak, *Ahmadinejad Menentang Amerika; Dari Nuklir Iran, Zionisme, Hingga penyangkalan Holocaust*, Buku kita, Jakarta, 2007.

²¹ *Ibid.*

B. Republik Islam Iran

1. Sejarah Republik Islam Iran

Republik Islam Iran berdiri setelah terjadinya revolusi besar yang dipimpin oleh Ayatullah Ruhullah Khomeini di tahun 1979 melawan kekuasaan Shah Reza Pahlevi. Shah Reza Pahlevi adalah pemimpin Negara Iran saat itu yang kepemimpinannya didukung oleh negara-negara Barat dukungan Amerika Serikat. Pada awal kekuasaannya, Dinasti Shah Muhammad Reza Pahlevi mendapat dukungan penuh dari para pemimpin Syi'ah, namun seiring dengan pembentukan identitas bangsa Iran dan modernisasi oleh Pahlevi sendiri, maka terdapat beragam kebijakan yang bertentangan dengan Islam dan wewenang serta kedudukan dari para ulama banyak dikurangi.

Beberapa kebijakan yang merasa dikurangi oleh Pahlevi yang bertentangan dengan Islam dan wewenang ulama seperti penetapan agama Majusi sebagai agama resmi negara yang berdampingan dengan agama islam, penghidupan kembali nama-nama dan simbol Persia Pra-Islam seperti dalam nama Pahlevi itu sendiri dan lambang singa-matahari, pembaharuan hukum dan pendidikan yang berkiblat ke barat, adanya kontrol atas pakaian dan kontrol atas sumbangan-sumbangan keagamaan dan sebagainya, sehingga peran ulama banyak digantikan oleh profesional²². Keadaan ini banyak menguntungkan kelas menengah ke atas dan memperlebar kesenjangan terutama dikalangan mayoritas bangsa itu.

²² Diyah Rahma fauziana-Izzudin Irsam Mujib, "Khomeini Dan Revolusi Iran", Narasi, Yogyakarta, 2010

Pudarnya dukungan dari para ulama dan pada akhirnya terjadi perenggangan hubungan antara negara dan ulama karena kekuasaan Iran semakin terpusat ditangan Pahlevi dan kelompok sekuler, Para ulama pun kemudian bersekutu dengan kaum *bazaaris*. Para ulama dan *bazaaris* ini kemudian melibatkan diri pada isu-isu ekonomi, sosial dan politik rakyat untuk berhadapan dengan Negara dan rezim Pahlevi.

Tahun 1962-1963, Ayatullah Khomeini tampil sebagai suara anti pemerintah diantara minoritas utama yang menganggap Islam dan Iran tengah dalam bahaya. Program modernisasi barat yang dijalankan oleh Pahlevi, ikatan erat Iran-AS dan perusahaan-perusahaan multinasional dipandang sebagai ancaman bagi Islam dan kehidupan umat muslim terlebih bagi Iran. Khomeini menjadi suara oposisi yang tak mengenal kompromi melawan kekuasaan mutlak dan "pemerintahan" atau pengaruh asing.

Perlawanan Khomeini tidak berakhir walaupun berada dalam pengasingannya setelah ditahan pada Juni 1963 dan diasingkan ke Turki tahun 1964²³, kemudian berpindah ke Irak tahun 1965 dan ke Perancis tahun 1978. Dari pengasingannya, Khomeini terus mengajar, menulis dan berbicara secara lantang menentang pemerintahan Pahlevi dan mengutuk kebijakan-kebijakannya yang "tidak islam". Khomeini tetap menyebarluaskan pandangannya bahwa Islam menampilkan sebuah jalan hidup yang menyeluruh dan sempurna yang dapat memberikan tuntunan dalam kehidupan sosial dan politik. Usaha Khomeini ini berhasil mengilhami berbagai aksi perlawanan didalam negeri Iran. Perlawanan

²³ *Ibid.*

yang pada awalnya hanya menginginkan pembaharuan, berubah menjadi revolusi sehingga terbentuklah Republik Islam Iran dengan pemimpinnya, Ayatullah Ruhullah Khomeini.

Kehadiran Khomeini yang tampil dengan gagasan revolusioner, anti imperialisme, menjunjung tinggi nasionalisme dan ajaran Islam inilah yang berhasil membawa perubahan menyeluruh di Negara Iran. Selain berhasil mengakhiri tradisi kerajaan sepanjang 2.500 tahun dan menggantinya dengan Republik Islam Iran, revolusi yang dilakukan Khomeini tidak hanya terbatas dalam bidang infrastruktur pemerintahan, melainkan juga mempengaruhi nilai-nilai identitas nasional, sosial, politik dan budaya.

Pasca kemenangan Revolusi Islam, langkah pertama yang dilakukan Teheran adalah memutus hubungan diplomatik dengan Rezim Zionis Israel. Pada dasarnya keputusan tersebut mencerminkan keinginan seutuhnya bangsa Iran yang sama sekali tidak mengakui eksistensi Rezim Zionis Israel. Iran sepenuhnya menentang hubungan diplomatik dengan Tel Aviv. Setelah itu, bekas kedutaan Israel di Teheran diserahkan kepada wakil Palestina. Iran juga memutus hubungan dengan pemerintah Mesir kala itu karena menandatangani perjanjian Camp David. Dan menentukan hari jum'at terakhir pada bulan Ramadhan sebagai hari Al-Huds Dunia. Kebijakan-kebijakan monumental tersebut adalah dalam rangka membantu merealisasikan pembebasan Palestina dan Baitul Maqdis yang diduduki kaum Zionis²⁴.

²⁴ D.Danny H. Simanjuntak, *Ahmadinejad Menentang Amerika; Dari Nuklir Iran, Zionisme, Hingga penyangkalan Holocaust*, Buku kita, Jakarta, 2007.

Slogan “tidak Timur, tidak Barat, tetapi Republik Islam” yang dicetuskan Khomeini ini sangat populer pada masa-masa pergolakan sebelum Republik Islam Iran terbentuk. Slogan tersebut kemudian dijadikan landasan bagi politik luar negeri Republik Islam Iran. Slogan tersebut mencerminkan sikap penentangan Khomeini terhadap Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang kemudian dimanifestasikan dengan dukungan Khomeini terhadap penyanderaan para diplomat AS pada tahun 1979, serta pembubaran partai Komunitas Tudeh dan pengusiran 18 diplomat Uni Soviet pada tahun 1983.

Pasca revolusi, militer Iran terbagi atas dua pasukan yaitu pasukan militer negara dan pasukan militer revolusi. Pasukan militer revolusi berjumlah 545.000 jiwa. Kedua pasukan bersenjata ini diletakkan dibawah kuasa Menteri Pertahanan dan Logistik Pasukan Bersenjata Iran. Korps Pengawal Revolusi Islam (*Sepah-e Pasdaran-e Enghelab-e Islami*), atau yang sering disingkat Pengawal Revolusi merupakan cabang militer terbesar di militer Iran.

Pengawal Revolusi terpisah dari angkatan bersenjata nasional Iran dan dibentuk sebagai kelompok kekuatan yang loyal kepada Pemimpin Tertinggi Iran atau Rahbar. Tentara ini dikenal sebagai kekuatan militer yang memiliki pasukan darat, air, udara, intelejen dan pasukan khusus dengan kekuatan 125.000 tentara yang memiliki kekuatan yang terdiri atas lima cabang yaitu Pasukan Quds (pasukan khusus), Pasukan Basij (paramiliter), Angkatan Laut Revolusi, Angkatan Udara Revolusi dan Angkatan Darat Revolusi.

Angkatan Basij adalah tentara paramiliter yang mempunyai anggota penuh 90.000 laskar dan juga 30.000 laskar simpanan ditambah dengan 11 juta

lelaki dan perempuan yang mampu dalam mobilitas. Tentara nasional Iran mempunyai 420.000 batalyon yang terbagi atas tiga kelompok utama yaitu Angkatan Darat sebanyak 350.000 pasukan, Angkatan Laut Iran sebanyak 18.000 pasukan dan Angkatan Udara Iran sebanyak 52.000 pasukan.

Republik Islam Iran yang berawal dari referendum yang hasilnya 98,2% rakyat Iran memilih merubah sistem pemerintahan monarki absolut menjadi berdasar kepada ajaran Islam Mazhab Syiah²⁵. Iran merupakan satu-satunya Negara Syiah di dunia. Mayoritas muslim di Iran adalah penganut Syiah Immamiyah²⁶ yang meyakini bahwa pemimpin umat Islam yang sah adalah keturunan Ahlul Bait²⁷. Madzhab Syiah Immamiyah ini mengakui bahwa ada dua belas Imam yang telah menuntun umat muslim dan juga meyakini bahwa Imam ke dua belas yang terkenal dengan sebutan Imam Mahdi akan muncul suatu saat ke dunia ini dari persembunyiannya untuk meluruskan ketidakbenaran dan ketersesatan umat muslim²⁸.

Menurut Syiah Dua Belas, selama masa kegaiban Imam Mahdi, kepemimpinan umat terletak di pundak para *fukaha*, baik dalam persoalan keagamaan maupun dalam urusan kemasyarakatan. Para *fukahalah* yang seharusnya menjadi pucuk pimpinan masyarakat, termasuk dalam persoalan kenegaraan atau politik. Hal itu disebabkan Imam Mahdi telah melimpahkan tanggung jawab kepemimpinannya yang mencakup urusan keagamaan dan

²⁵ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2003

²⁶ Allamah M.H Thabathaba'i, *Islam Syiah (asal usul dan perkembangannya)*, graffiti press, Jakarta, 1989.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Vilayat-I faqih menjadi konsep utama pada masa kepemimpinan Khomeini³⁰. *Vilayat- I faqih* adalah perwalian oleh pemimpin keagamaan tertinggi. Konsep ini lahir ditengah-tengah kancah ideologi politik Islam yang dangkal dan reaksioner yang merupakan arah dan sebuah cara berpikir yang baru. Konsep *Vilayat- I faqih* dituang dalam konstitusi Republik Islam Iran, ditandai dengan kedekatannya dengan doktrin politik Syiah dan keberhasilannya dalam menyelaraskan syariat dengan cita-cita demokrasi.

Vilayat I-Faqih menjadi suatu doktrin politik yang khas “Syiah Iran”. *Vilayat I-Faqih* ini memberikan legitimasi formal bagi dominasi kaum mullah dalam sistem politik Republik Islam Iran. Selain *Vilayat I-Faqih*, ada doktrin Khomeini yang lainnya yaitu mengenai perjuangan kaum *mustadh'afin* melawan kaum *mustakbirin*. Khomeini mengidentikkan Iran sebagai Negara *mustadh'afin* (kaum tertindas) yang tengah berjuang melawan kekuatan-kekuatan *mustakbirin* (penindas) diseluruh dunia. Dalam hal ini AS dan Israel dimasukkan dalam kelompok *mustakbirin*.

Konsep yang digunakan oleh Khomeini berdasar pada teori Syiah tentang legitimasi politik dan konsep *Immamat*³¹. Sebagian ahli syariah, menurut Khomeini, para fuqaha itulah yang paling berhak menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum Islam. Menurut Khomeini, pemerintahan oleh para ahli hukum sesuai dengan contoh yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Ahli hukum yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan negara, meskipun tidak mempunyai kedudukan yang sama sebagaimana

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*.

Nabi. Pemerintahan semacam itu dapat dilaksanakan oleh sekelompok ahli hukum, atau bahkan seorang individu.

Konsep pemerintahan Islam yang diterapkan oleh Khomeini yaitu kedaulatan menjadi milik Tuhan dan semua hukum yang diperlukan diberikan syariah. Oleh sebab itu, kewajiban utama rakyat adalah menerapkan hukum-hukum Tuhan dan hidup sesuai dengannya. Sehingga orang yang pantas memerintah adalah mereka yang memahami hukum-hukum Tuhan, dan didalam keghaiban Imam orang-orang inilah yang menjadi ulama. Jadi didalam Pemerintahan Islam Khomeini, ulama menjadi Wali sekaligus penafsiran serta pelaksana hukum Tuhan, dan pemerintahan yang demikian menjadi pemerintahan Islam yang adil dan sebenarnya.

Didalam Republik Islam Iran terdapat lima lembaga penting yaitu Faqih, Presiden, Perdana Menteri, Parlemen dan Dewan Pelindung Konstitusi³². Kekuasaan terbesar dikuasai oleh faqih yang dipilih oleh Dewan Ahli dengan syarat-syarat tertentu. Wewenang faqih antara lain yaitu bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan umum Republik Islam Iran.

Seorang Faqih atau Rahbar mempunyai kekuasaan mutlak untuk menyatakan perang. Rahbar juga berkuasa untuk mengangkat Ketua pengadilan Tertinggi Iran, mengangkat dan memberhentikan seluruh Pimpinan Angkatan Bersenjata Iran, Mengangkat anggota Dewan Pelindung Konstitusi dan yang terakhir adalah membentuk Dewan Pertahanan Nasional yang anggota-

³² Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, Pustaka Zahra, Jakarta, 2002.

anggotanya terdiri dari Presiden, Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, KSAB, Kepala Pasdaran dan dua orang penasehat yang diangkat oleh faqih³³.

Kekuasaan legislatif di Iran ditangani oleh tiga lembaga yaitu *Majelis-e-syura-e islami* (Majelis Konsultasi Islami), *Shuraye-Nigahban* (Dewan Perwalian Undang-undang Dasar atau *The Council of Constitutional Guardians*) dan *Majelis-e Khubreqan* (Majelis Ahli)³⁴. *Majelis-e-syura-e islami* (Majelis Konsultasi Islami) berfungsi sebagai parlemen yang terdiri dari 270 anggota yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan selama empat tahun. Landasan falsafah majelis adalah musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan al-Qur'an surat As-Syura:38. Golongan Zoroaster, Yahudi dan Kristen serta Armenia masing-masing mendapatkan satu kursi di Majelis.

Lembaga legislatif berikutnya adalah *Shuraye-Nigahban* (Dewan Perwalian Undang-undang Dasar atau *The Council of Guardian of the Constitution*) yang fungsinya sebagai lembaga legislatif terbatas namun kedudukannya menentukan karena dewan yang duduk pada lembaga ini adalah orang-orang yang mahir dalam berbagai cabang ilmu hukum. Anggota dewan ini 12 orang yang terdiri dari 6 Fuqaha dan 6 ahli hukum. Majelis ketiga adalah *Majelis-e Khubreqan* (Majelis Ahli) yang berfungsi untuk memilih dan memberhentikan seorang pemimpin (Imam).³⁵ Majelis ini beranggotakan 73 ulama senior yang dipilih langsung oleh rakyat.

³³ *Ibid.*

³⁴ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2003

³⁵ *Ibid.*

Sementara dalam kekuasaan eksekutif, kekuasaan tertinggi Negara Republik Islam Iran berada ditangan Presiden. yang masih berada dibawah garis kekuasaan Imam atau *Vilayat-I faqih* yang menurut pasal 113 disebutkan bahwa “Presiden bertanggung jawab dalam penerapan UUD, pengaturan ketiga cabang kekuasaan dan pemimpin cabang eksekutif, kecuali dalam hal yang secara langsung menjadi tanggung jawab Imam atau pemimpin spiritual”. Eksekutif merupakan kekuatan tertinggi Negara di Iran, namun tindakan dan kebijaksanaannya masih dapat ditolak oleh pemimpin spiritual tertinggi di Iran³⁶.

Seorang presiden dipilih melalui pemilihan umum dan presiden Iran memerintah selama empat tahun. Setiap calon presiden harus mendapat persetujuan dari Majelis Wali Iran sebelum pemilu digelar agar mereka “sejalan” dengan gagasan Negara Islam. Presiden Iran juga melantik dan mengepalai Kabinet Iran dan berkuasa membuat keputusan mengenai administrasi Negara.

Didalam Negara Iran terdapat delapan wakil presiden dan dua puluh satu menteri yang ikut serta membantu presiden dalam administrasi. Presiden Iran mempunyai kuasa melantik Menteri Pertahanan dan intelijen dan harus mendapat persetujuan Pemimpin Agung dan badan perundangan. Namun seorang Presiden Iran tidak memiliki kekuasaan dalam pasukan bersenjata seperti presiden pada umumnya³⁷.

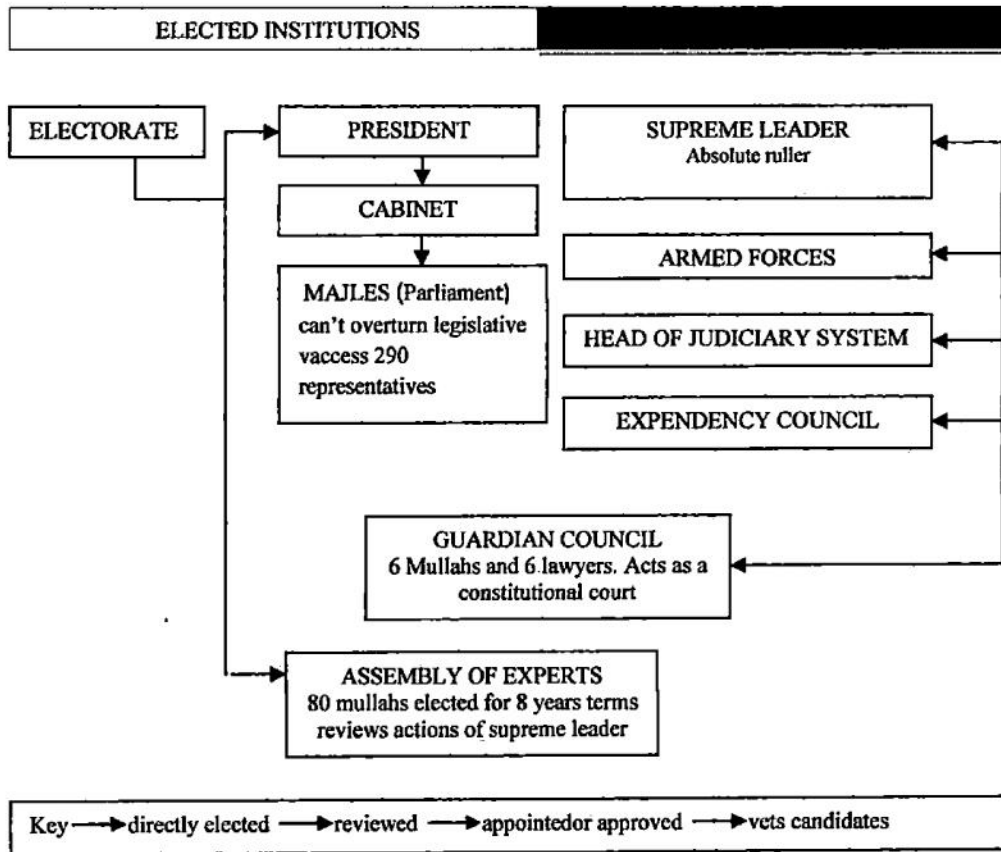
Kekuasaan legislatif sebagai lembaga peradilan terdiri atas Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Rendah. Menteri Kehakiman ditunjuk oleh presiden dari calon-calon yang diajukan oleh kepala peradilan. Tugas dari

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, Pustaka Zahra, Jakarta, 2002

Menteri Kehakiman yaitu menjaga segala hal yang berkaitan dengan hubungan antara eksekutif dan legislatif dan masalah-masalah hukum. Kepala Pengadilan dan Jaksa Penuntut Umum, semuanya berasal dari ahli-ahli hukum Syi'ah³⁸.

Gambar 2.2 Struktur Politik Iran³⁹



Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/iran>

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Khatami dianggap sebagai presiden reformis pertama di Iran karena kampanyenya memfokuskan pada penegakan hukum, demokrasi dan pencakupan seluruh rakyat dalam proses perencanaan politik. Namun asas pemerintahannya acap kali bertentangan dengan kelompok garis keras dan konservatif Islamis di dalam pemerintah Iran, yang menguasai organisasi pemerintahan utama seperti Dewan Perlindungan (*Guardian Council*) yang anggotanya dipilih oleh Pemimpin Agung. Kebijakan politik luar negeri Iran ditangan Khatami lebih bersifat kompromistis. Hal tersebut dikarenakan Khatami yang mempunyai sifat lebih reformis.

Pada pemilu parlemen tahun 2004, kaum konservatif menang di kursi parlemen. Hal tersebut menghadirkan spekulasi bahwa kaum konservatif menginginkan perubahan dalam kebijakan politik Iran. Puncak dari spekulasi tersebut terbukti dengan terpilihnya Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan seorang aliran konservatif memenangkan pemilu Iran sebagai presiden Iran pada tahun 2005.

C. Iran Masa Kini

1. Ahmadinejad Sebagai Presiden Iran

Ahmadinejad adalah seorang dosen di Universitas Sains dan Teknologi Iran. Ahmadinejad juga seorang ahli perencanaan transportasi dan lalu lintas. Awal karir Ahmadinejad di pemerintahan berawal sebagai staff ahli kebudayaan dan kementerian pendidikan tinggi Iran untuk Provinsi Ardabil. Kemudian Ahmadinejad juga bertindak sebagai Wakil Gubernur dan juga pernah menjadi

Gubernur Maku dan Khoy serta menjadi penasehat Menteri Kebudayaan dan Ajaran Islam.

Pemilihan Ahmadinejad sebagai Gubernur Ardabil terjadi pada tahun 1993⁴⁰. Karirnya yang cemerlang membuatnya terpilih sebagai gubernur teladan Iran selama 3 tahun berturut-turut. Figur Ahmadinejad tidak terkenal dikalangan perpolitikan Iran hingga terpilih menjadi Walikota Teheran pada tahun 2003⁴¹. Ahmadinejad bukanlah seorang ulama dan karir birokrasinya kurang dari sepuluh tahun pada waktu itu. Hal tersebut sangat menarik perhatian mengingat Iran adalah Negara yang dikuasai oleh para mullah.

Jenjang karir Ahmadinejad sangat bersih dan transparan, jauh dari korupsi. Dalam masa tugasnya Ahmadinejad banyak melakukan perubahan. Ahmadinejad mementingkan nilai-nilai keagamaan dalam kegiatan di pusat-pusat kebudayaan. Kebijakannya bersifat religius seperti memisahkan lift untuk pria dan wanita. Selain itu Ahmadinejad menjadikan rumah dinas sebagai museum publik. Ahmadinejad lebih memilih tinggal di rumah pribadinya yang berada di gang kecil kawasan perumahan miskin di Iran.

Selama menjabat, Ahmadinejad tak segan untuk turun ke jalan membersihkan jalan-jalan kota, dan memastikan bahwa tidak ada saluran air yang mampet. Ahmadinejad bekerja hingga dini hari hanya untuk memastikan bahwa Teheran dapat menjadi tempat yang layak untuk ditinggali. Setelah menjabat selama dua tahun sebagai walikota Teheran, karena prestasi dan pengabdian yang luar biasa dilakukan oleh Ahmadinejad, ia pun kemudian

⁴⁰ Hussen D. Hassan, "Iran: Profile of President Mahmoud Ahmadinejad"
<http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22569.pdf> diakses pada 25 Maret 2011

⁴¹ *Ibid.*

mendapatkan penghargaan kelas dunia *World Mayor* dari 550 walikota yang masuk nominasi.

Tanggal 24 Juni 2005 Ahmadinejad menjadi pembicaraan seluruh dunia karena berhasil menjadi Presiden Iran. Ahmadinejad mencengangkan banyak orang karena ia berhasil mengalahkan lawan-lawannya yang telah memiliki segalanya dan memiliki kekuatan. Pada awal kampanye, Ahmadinejad hampir saja tidak masuk hitungan karena berada diantara lawan-lawan yang tangguh. Kala itu Ahmadinejad bersaing dengan Akbar Hasyemi Rafsanjani, Ali Larijani, Mehdi Karrubi, Mohammad Bhager Galibaf, Mohsen Meharalizadeh, Mohsen Rezai dan Mostafa Min.

Pada kampanyenya, Ahmadinejad mengusung isu pengurangan kemiskinan dan pengangguran⁴². Ia juga mengaku toleran terhadap budaya dari luar kecuali Amerika. Ahmadinejad merasa hubungan Iran dengan Amerika hanya akan merugikan Iran. Ahmadinejad juga tidak mempercayai PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Hak Veto lima negara anggota tetap Dewan keamanan dia pandang tidak adil dan merugikan umat Islam di seluruh dunia.

Dalam hal nuklir Ahmadinejad menegaskan bahwa tidak akan tunduk kepada barat dan Amerika khususnya. Nuklir merupakan salah satu senjata untuk memperkuat ketahanan nasional Iran. Liberalisasi di Iran memang tidak berhasil, liberalisasi lebih diartikan mendekatkan diri dengan Barat terutama Amerika. Ahmadinejad juga mengusung nasionalisasi. Sebuah kata yang sangat dibenci

⁴² *Ibid.*

oleh Barat. Amerika dan Barat justru tengah gencar untuk merebut asset-aset penting Negara-negara berkembang.

Ahmadinejad tidak berbeda dengan Hugo Chavez di Venezuela dan Fidel Castro di Kuba. Hanya saja, Iran adalah salah satu Negara yang berlandaskan syariat Islam. Maka reaksi Amerika dan Negara-negara Barat terhadap Iran sangat berlebihan. Hal tersebut mengundang was-was negara-negara Timur tengah yang pro dengan AS dan Barat. Negara-negara kawasan Timur Tengah ini was-was terhadap perkembangan politik yang akan terjadi.

Mahmoud Ahmadinejad memang seseorang yang sarat dengan kontroversi. Ia Presiden Iran yang bukan berasal dari Mullah yang selama puluhan tahun telah mendominasi hampir semua pos kekuasaan di Iran⁴³. Ia juga bukanlah seseorang yang berasal dari elit yang dekat dengan kekuasaan, tidak memiliki *track-record* sebagai politisi. Ahmadinejad merupakan seorang revolusioner sejati seperti halnya Ayatullah Khomeini. Hanya saja Khomeinini tampil sebagai sufistik, Ahmadinejad justru tampil begitu merakyat dan mudah untuk dijangkau oleh siapapun rakyatnya. Sebagai mana mentornya, Ahmadinejad tidak terpengaruh oleh kekuasaan. Kekuasaan seperti tidak menyentuh karakter-karakter didalamnya.

⁴³ Sayyid Maulana Khan, *Ahmadinejad The Lion From Aradan*, DAR! Mizan, Bandung, 2007.

2. Kebijakan Luar negeri Ahmadinejad

Di bawah kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad tidak bisa dipungkiri kini Iran menjadi negara paling berpengaruh di Timur Tengah. Keberhasilan politik luar negeri Iran dalam dua tahun pertama masa pemerintahan Ahmadinejad dapat ditelusuri di kawasan Timur Tengah. Sistem diplomasi Republik Islam Iran dengan memanfaatkan seluruh kemampuan yang dimiliki berhasil dalam aksi-aksinya di Irak, Afghanistan, Palestina, Lebanon dan juga Amerika Latin. Kemampuan diplomasi pemerintah Ahmadinejad mengubah Revolusi Islam Iran menjadikan salah satu negara terkuat di Timur Tengah.

Ketika Timur Tengah menjadi pusat konsentrasi tekanan politik dan militer AS dan sekutunya terhadap Iran, keberhasilan diplomasi Iran lebih mendominasi⁴⁴. Seperti pada hubungan Iran-Irak, pejabat-pejabat tinggi Irak justru lebih menganggap Iran sebagai negara sahabat, bukan musuh seperti yang diprovokasikan oleh AS dan Israel. Kunjungan Ahmadinejad untuk pertama kalinya ke Baghdad Maret 2008 lalu menjadi sejarah dan bukti yang nyata. Didalam kunjungannya Ahmadinejad berupaya lebih meyakinkan para pemimpin Irak bahwa Iran mendambakan perdamaian di Irak, bukan kekerasan seperti yang dituduhkan oleh AS dan Israel.

Hubungan yang baik juga terjalin di Afganistan. Presiden Afganistan Hamid Karzai menyatakan bahwa terjalin hubungan yang sangat baik antara Iran dengan Afganistan. Selain itu, kunjungan Ahmadinejad ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga semakin memperkuat hubungan Iran dengan negara-negara

⁴⁴ *Ibid.*

sekitar Teluk Persia. Hal tersebut menjadi catatan tersendiri dan menjadi bukti kemenangan diplomasi Iran di Kawasan Timur Tengah⁴⁵.

Keberadaan Iran sebagai Negara yang berpengaruh di Kawasan Timur Tengah semakin diperkuat dengan predikatnya sebagai salah satu penghasil minyak terbesar di dunia⁴⁶. Iran memiliki cadangan minyak melebihi 138 milyar barrel dan cadangan gas mencapai 29 triliun meter kubik. Kebijakan Negara Iran sebelum berada di tangan Ahmadinejad salah satunya adalah menjadikan minyak sebagai ekspor utama dengan hasil 6 juta barrel sehari. Namun, setelah Ahmadinejad berkuasa, kebijakan baru dibuat yang isinya bahwa Iran hanya akan mengekspor 3 juta barrel per hari. Kebijakan Ahmadinejad tersebut merupakan kebijakan mengurangi ketergantungan pendapatan Iran dari sektor minyak dan pemerintah memprioritaskan ekspor gas dan hasil-hasil non migas.

Pasca Revolusi Islam Iran, negara ini berubah menjadi negara yang sangat menentang dominasi barat. Terlebih pada masa pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad, kebijakan-kebijakan pemerintah sangat kontroversial dan konfrontatif terhadap negara-negara Barat. Saat ini hegemoni Barat berhadapan dengan Republik Islam Iran dalam masalah nuklir. Kebijakan pemerintah mengenai pengayaan uranium yang digulirkan Iran menuai sanksi dari barat, bahkan AS mengembargo Iran karena tetap melanjutkan program nuklirnya. Tudingan AS bahwa Iran menghasilkan nuklir untuk dijadikan bom atom dan keperluan perang ditampik oleh Ahmadinejad. Nuklir yang digulirkan Iran bertujuan untuk perdamaian. Ahmadinejad justru mengancam negara-negara

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Irib, "Stabilitas Migas Iran di Bawah Tekanan Sanksi", <http://Irib.ir> diakses pada 16 Maret 2011 pukul 15.25WIB

yang mempunyai nuklir untuk persenjataan agar segera dimusnahkan demi perdamaian dunia⁴⁷.

Ahmadinejad juga berpendapat bahwa Barat khawatir bila Iran mampu meraih semua tujuan yang diinginkannya di bidang pemanfaatan damai energi nuklir maka Iran akan menjadi simbol bagi seluruh Negara berkembang. Masyarakat tertindas di dunia akan meniru apa yang telah dicapai oleh bangsa Iran dan akan mempermasalahkan otoritas monopoli sejumlah negara atas energi nuklir. Atas dasar inilah, AS dan sejumlah sekutunya di Eropa serta Rezim Zionis Israel mengerahkan segala kekuatannya untuk menghentikan program damai nuklir Iran.

Iran sendiri sangat menyadari hal tersebut, namun Iran tetap menginginkan mempunyai hak untuk menentukan nasib mereka sendiri di masa depan. Bangsa Iran menginginkan independensi dan tidak ingin bangsa lain mengintervensi secara hegemonik apa yang menjadi hak bangsa Iran. Ahmadinejad menyatakan Iran tidak akan mundur selangkahpun dan akan tetap melanjutkan program nuklirnya. Ahmadinejad juga pernah membuat pernyataan yang mencengangkan dunia *"Jika nuklir dianggap buruk, mengapa kalian (Barat) boleh memilikinya? Dan jika nuklir dianggap baik, mengapa kami (Iran) tidak boleh memilikinya"*⁴⁸.

Sanksi yang dikeluarkan DK PBB nomor 1737 kepada Iran tidak dipenuhi oleh Iran. Tenggat waktu enam puluh hari yang diberikan PBB hingga tanggal 27 Februari 2007 telah dilampaui oleh Iran. Sejarah menyatakan Iran tidak akan

⁴⁷ Sayyid Maulana Khan, *Ahmadinejad The Lion From Aradan*, DAR! Mizan, Bandung, 2007.

⁴⁸ D.Danny H. Simanjuntak, *Ahmadinejad Menentang Amerika; Dari Nuklir Iran, Zionisme, Hingga penyangkalan Holocaust*, Buku kita, Jakarta, 2007.

tunduk pada resolusi DK PBB itu yang notabene sangat didominasi kepentingan AS. Iran menyatakan siap menerima segala resiko yang akan dihadapinya akibat dari ketidakpatuhannya terhadap resolusi DK PBB tersebut. Ahmadinejad juga menyatakan bahwa Iran menentang setiap bentuk arogansi imperialisme dari AS. Ahmadinejad bertekad akan mempertahankan proyek nuklirnya. Petinggi negeri Mullah termasuk pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khomeini juga menyatakan hal serupa. Bagi Iran, proyek nuklir Iran adalah hak asasi yang tidak boleh diganggu gugat, bahkan oleh PBB sekalipun.

Menurut Iran, kaum Yahudi lah pihak yang bertanggung jawab atas krisis nuklir Iran. Iran menganggap tekanan AS atas program nuklirnya yang sah menurut Pakta Non-Proliferasi Nuklir tidak terlepas dari lobi Yahudi atas permintaan pemerintah Israel. Telah diketahui bahwa Israel memiliki 200-300 hulu ledak yang mengancam keamanan seluruh anggota Timur Tengah termasuk Iran didalamnya.

Hal-hal kontroversial lain yang dilontarkan Ahmadinejad adalah ketika menyatakan bahwa Israel harus di hapus dari peta dunia. hal tersebut karena keberadaan Israel sebagai Negara tidak sah, juga hanya mengundang masalah yang rumit di Timur Tengah. Selain itu, pernyataan lain yang tak kalah kontroversial adalah pernyataannya bahwa Holocaust (peristiwa pemabantaian oleh Rezim Nazi kepada kaum Yahudi pada masa Perang Dunia II) hanyalah

sebuah mitos belaka yang digunakan oleh bangsa Eropa untuk menciptakan Negara Yahudi di jantung Dunia Islam⁴⁹.

Strategi politik luar negeri Iran dalam menggapai tujuan salah satu caranya dengan menghegemoni dunia Islam⁵⁰. Mendayagunakan umat dengan seluruh kemampuannya demi kehidupan dan pertumbuhan tataran masyarakat internasional merupakan hal sangat penting bagi Iran. Tujuan menjadikan islam sebagai pegangan yaitu untuk mendukung posisi Iran dalam mencapai segala aktifitasnya di dunia internasional. Ketika Iran melakukan aktifitas internasional di Dunia Islam dan mendukung gerakan-gerakan Islam (perlawanan), seperti dukungan Iran terhadap Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina, hal tersebut akan menjadi sumber kekuatan Iran.

Hasil dari aktifitas internasional Iran di Dunia Islam yaitu Iran telah memiliki basis ideologi di Lebanon. Kepemilikan basis dukungan di Lebanon tersebut menjadi pendukung kepentingan Iran di dunia Internasional. Melalui basis dukungan di Lebanon, Iran bisa menggunakan dukungan tersebut untuk kepentingan Iran. Jika suatu saat pun Iran menghendaki Hizbullah untuk menyerang kepentingan negara yang memiliki permusuhan dengan Iran, Hizbullah pun akan siap membantu.

Strategi politik luar negeri Iran yang lain adalah prinsip Ummu Qura⁵¹ yang dimaksudkan yaitu Iran yang memimpin Dunia Islam. Hal tersebut terlihat dari ekspansi nilai-nilai dan ajaran Revolusi Islam yaitu Vilayat I-Faqih yang

⁴⁹ Hussen D. Hassan, "Iran:Profile of President Mahmoud Ahmadinejad"
<http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22569.pdf> diakses pada 25 Maret 2011

⁵⁰ M.Anas Aziz, "Politik Iran dan Pengaruh Syiah", Mesir, 2010. Lihat di www.Masionline.com diakses pada 25 Agustus 2010

⁵¹ *Ibid.*

berarti kekuasaan tertinggi dalam struktur politik Republik Islam Iran yang berada di tangan Imam. Tujuan penting dari politik luar negeri Iran adalah menjaga kebutuhan internal ummu Qura yang tak lain adalah Iran. Kebijakan politik luar negeri Iran di kawasan Timur Tengah dan seluruh negara-negara Islam berlandaskan upaya mewujudkan persatuan di dunia Islam. Kunjungan-kunjungan Presiden Ahmadinejad ke negara-negara seperti Suriah, Malaysia, Azerbaijan, Tajikistan, Qatar, Sudan, UEA dan Arab Saudi bertujuan mewujudkan persatuan negara-negara Islam.

Tanggal 13 Oktober 2010 lalu, Presiden Mahmoud Ahmadinejad melakukan kunjungan kenegaraan ke Lebanon⁵². Kedatangan Ahmadinejad merupakan atas undangan Presiden Lebanon, Michel Sleiman. Dalam kunjungan pertama ke Lebanon ini Ahmadinejad mengadakan pembicaraan dengan Presiden Michel Sleiman dan Perdana Menteri Saad Hariri. Presiden Ahmadinejad disambut bagai pahlawan setibanya di Libanon dengan taburan beras dan helai bunga mawar oleh puluhan ribu pendukung Hizbullah. Para pendukung Ahmadinejad berbaris di jalan-jalan dan melambaikan bendera Iran saat rombongan kendaraan Ahmadinejad melintas di jalan dari bandar udara menuju Istana Kepresidenan Lebanon. Kunjungan dua hari Presiden Iran itu dipandang sebagai dorongan bagi gerakan pejuang Syiah Hizbullah.

Pada kesempatan kunjungan Ahmadinejad tersebut, di hadapan Presiden Michel Sleiman Ahmadinejad memuji aksi perlawanan Hizbullah terhadap rezim Zionis dan menawarkan dukungan negaranya untuk tujuan itu. Ahmadinejad juga

⁵² TV One, "Ahmadinejad Disambut dengan Beras dan Mawar di Libanon", lihat di <http://tvonenews.com> diakses pada 21 Oktober 2010 pukul 16.27WIB

menyatakan bahwa Iran mendambakan kemerdekaan penuh wilayah Lebanon, Suriah dan Palestina yang dijajah oleh rezim Zionis. Dalam pernyataannya juga Ahmadinejad mengatakan Iran siap membantu Beirut menghadapi setiap agresi Israel.

Setelah kunjungan ke Istana Presiden usai, Ahmadinejad kemudian tampil di pertemuan terbuka di Bint Jubail, wilayah yang merupakan basis utama Hizbullah di bagian selatan Beirut. Ahmadinejad melambaikan tangan ke arah puluhan ribu orang yang sudah berkumpul di Bint Jubail, Lebanon Selatan sebelum duduk di sebelah wakil panglima kelompok pejuang Libanon, Naim Qassem.

Bagi rakyat Lebanon, Iran adalah negara yang menjadi salah satu pendukung ideologi, militer, dan keuangan utama bagi kelompok Syiah Libanon⁵³. Namun AS dan Israel justru menganggap kunjungan Ahmadinejad tersebut sebagai tindakan provokatif dan menjadi bukti dukungan atas transformasi Lebanon jadi negara ekstrem.

⁵³ *Ibid.*